



PERTEMUAN PRESIDEN XI JINPING DAN RAJA SALMAN

Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi di Istana al-Yamamah Riyadh di Arab Saudi, Kamis (8/12).

Rusia Coba Rebut Kembali Beberapa Wilayah di Ukraina

Rusia ingin menguasai kembali lahan luas yang sempat Rusia duduki selama invasi.

BAKHMUT (IM)-Pejabat

Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki seluruh garis depan wilayah Donetsk di Ukraina timur. Tampaknya Kremlin ingin menguasai kembali lahan luas yang sempat Rusia duduki selama invasi. Dalam sebuah wawancara di televisi, Gubernur Donetsk Pavlo Kyrylenko mengatakan pertempuran sengit terjadi di dekat Kota Bakhmut dan Avdiivka. Kyrylenko mengatakan tembakan artileri ke Kota Toretsk di barat daya Bakhmut menewaskan satu orang dan

merusak 12 gedung. Ia mengatakan "seluruh garis depan ditembaki" dan pasukan Rusia juga mencoba bergerak maju ke Kota Lyman yang berhasil pasukan Ukraina rebut kembali pada November lalu. Salah satu pukulan bagi Rusia dalam invasi ke negara tetangganya bulan Februari lalu. Komando militer Ukraina mengatakan tembakan artileri Rusia menyerang infrastruktur sipil di Kota Kupiansk dan Zolochiv di timur laut Kharkiv dan Ochakiv di wilayah Mykolaiv.

Di aplikasi kirim pesan Telegram, Gubernur Kharkiv Oleh Synehubov mengatakan unit-unit anti pesawat Ukraina menembak jatuh beberapa rudal di wilayah Kharkiv. Laporan dari medan pertempuran belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Amerika Serikat terus menunjukkan keberpihakannya kepada Ukraina dalam konflik Ukraina melawan Rusia. Terbaru, Pentagon menyiapkan paket bantuan senilai 275 juta dolar AS untuk Ukraina yang mencakup persenjataan anti-drone. Dilansir dari Reuters, pengumuman resmi mengenai pengiriman paket ini kemungkinan akan disampaikan pada hari

Jumat (9/12) waktu setempat. Paket yang nilainya setara dengan Rp 4,28 triliun itu akan ditanggung oleh Presidential Drawdown Authority (PDA), otoritas yang memungkinkan AS untuk mentransfer keperluan pertahanan dari stok yang mereka miliki. PDA bahkan bisa mengirimkan paket bantuan militer dengan cepat tanpa persetujuan kongres jika menanggapi keadaan darurat. Selain paket tersebut, Pentagon juga diperkirakan akan menyertakan roket untuk peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (Himars) buatan Lockheed Martin, amunisi 155mm, kendaraan militer Humvee, dan generator sebagai sumber energi.

Pengiriman beragam senjata pertahanan udara ini dilakukan AS untuk mengantisipasi serangan rudal Rusia yang intensitasnya semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. AS juga telah mengumumkan rencana pengiriman empat sistem pertahanan udara jarak pendek yang menggunakan rudal Stinger, buatan Raytheon Technologies, dan rudal pencegat Hawk. Sejak invasi Rusia dimulai 24 Februari lalu, AS telah menggelontorkan bantuan militer senilai US\$19,1 miliar untuk Ukraina. Parlemen AS bahkan mulai mengambil suara pada hari Kamis (8/12) untuk memberi bantuan tambahan senilai US\$800 juta pada tahun 2023. ● tom

Jepang Tolak Banding Okinawa untuk Hentikan Pembangunan Pangkalan AS

TOKYO(IM)-Pengadilan tinggi Jepang menolak permohonan Pemerintah Prefektur Okinawa untuk menghentikan pembangunan tempat untuk relokasi pangkalan utama Amerika Selatan di prefektur pulau selatan Jepang itu. Keputusan Mahkamah Agung itu menguatkan putusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan yang lebih rendah di mana kasus tuntutan Okinawa terhadap pemerintah pusat Jepang dibatalkan. Okinawa menentang legalitas keputusan menteri pertanahan pada 2019 untuk mengesahkan pekerjaan pembangunan tempat untuk fasilitas pengganti Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma. Namun, Mahkamah Agung mengatakan bahwa persetujuan untuk pekerjaan tersebut adalah tugas yang dipercayakan secara hukum oleh Pemerintah Pusat dan Prefektur Okinawa tidak dapat mengajukan gugatan untuk mencabutnya. Seperti yang dilakukan Pengadilan Distrik Naha pada November 2020 dan Pengadilan Tinggi Fukuoka cabang Naha pada Desember 2021, Mahkamah Agung Jepang pun tidak menunjukkan apakah sah bagi kementerian pertanahan untuk membatalkan keputusan pemerintah prefektur yang mencabut izin untuk pekerjaan pembangunan tempat tersebut. Penduduk di Okinawa, yang menampung sebagian besar fasilitas militer AS di Jepang, menentang relokasi tersebut. Mereka mengeluhkan kecelakaan dan tindak kejahatan yang terkait dengan kehadiran militer AS serta kebinasaan dan degradasi lingkungan. Rencana relokasi disepakati antara Tokyo dan Washington pada 1996 di bawah kesepakatan yang mengembalikan tanah yang ditempati oleh lapangan terbang Henoko dipilih sebagai lokasi pada 1999. Gubernur Okinawa sebelumnya, Hirokazu Nakaima, yang umumnya lebih mendukung soal relokasi pangkalan AS, menyetujui pembangunan tempat itu di daerah Henoko pada 2013. Namun, perselisihan hu-

kum dan politik terjadi selama bertahun-tahun, ketika penganti Nakaima Takeshi Onaga, yang merupakan penentang sengit rencana tersebut, membatalkan persetujuan tersebut. Onaga membatalkan persetujuan pada 2015 dengan menyebutkan adanya cacat hukum dalam keputusan Nakaima. Akan tetapi, Mahkamah Agung Jepang tetap memenangkan keputusan Pemerintah Pusat pada tahun berikutnya dan mengizinkan dimulainya kembali pekerjaan pembangunan tempat tersebut. Pada 2018, Prefektur Okinawa mencabut izin untuk pekerjaan semacam itu lagi, dengan alasan penemuan konstruksi tanah yang lemah di lokasi reklamasi yang direncanakan. Pada 2019, menteri pertanahan Jepang saat itu, Keiichi Ishii, membatalkan pencabutan rencana pembangunan oleh Okinawa. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno menyambut baik keputusan Mahkamah Agung, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Pusat akan dapat melanjutkan relokasi pangkalan AS yang direncanakan. Gubernur Okinawa saat ini, Denny Tamaki, menyebut putusan pengadilan itu "sangat disesalkan" dan "tidak mungkin disetujui". Prefektur Okinawa mencakup sekitar 0,6 persen dari total luas daratan Jepang, tetapi menampung sekitar 70 persen instalasi militer Amerika Serikat di negara tersebut berdasarkan luas areal. Tokyo mengatakan bahwa relokasi pangkalan militer AS ke Henoko adalah satu-satunya pilihan untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pangkalan Futenma karena lokasinya saat ini. Langkah itu diambil Tokyo untuk mempertahankan keamanan pertahanan negara di bawah aliansi keamanan Jepang-AS yang telah lama terjalin. Okinawa memiliki kepentingan strategis bagi Jepang dan AS mengingat kehadiran Tiongkok yang semakin meluas dan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. ● gul

Jurnalis dan Karyawan *New York Time* Gelar Aksi Mogok Tuntut Kenaikan Upah

WASHINGTON (IM) – Sekitar 1.100 karyawan yang tergabung ke dalam serikat pekerja *New York Times* melakukan aksi mogok kerja pada Kamis (8/12), menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi. Dikutip dari *The Guardian*, aksi mogok kerja terjadi di tengah frustrasi karena tawar-menawar telah berlarut-larut sejak kontrak karyawan di serikat pekerja *NewsGuild* berakhir pada Maret 2021. Adapun, aksi mogok kerja itu menandai pertama kalinya karyawan *New York Times* berpartisipasi dalam penghentian kerja sejak awal 1980-an dan terjadi di tengah gerakan buruh yang berkembang di seluruh Amerika Serikat di mana karyawan dari perusahaan seperti Amazon, Starbucks dan Apple telah mengorganisir dalam upaya untuk melawan apa yang mereka katakan sebagai praktik ketenagakerjaan yang tidak adil. "Hari ini kami siap untuk bekerja selama yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil, tetapi manajemen meninggalkan meja dengan sisa waktu lima jam," tweet

serikat pekerja *New York Times* pada Rabu (7/12). Lantas, *The New York Times* mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi aksi pemogokan itu. "Sangat mengecewakan bahwa mereka mengambil tindakan ekstrem ketika kami tidak berada di jalan buntu," kata perusahaan itu. Sementara itu, Nick Confessore, seorang koresponden politik di surat kabar itu, mengatakan kepada *Guardian* bahwa aksi pemogokan terasa seperti "berkabung". "Tugas kami adalah meliput berita ini," kata Nick. "Hari ini, saya mundur dari keyboard saya, karena saya merasa bahwa untuk membangun *New York Times* yang dapat melayani pembaca kami dengan sebaik-baiknya di masa depan, kami membutuhkan kesepakatan yang lebih baik dengan orang-orang yang ada di sini," imbuhnya. Adapun, Dana Goldstein, seorang koresponden domestik yang telah bekerja di perusahaan selama enam tahun, mengatakan kenaikan upah yang ditawarkan "mengece-

wakan", terutama pada saat PHK melanda industri berita dan ekonomi AS sedang terpukul oleh inflasi. "Kenaikan yang mereka tawarkan kurang dari kenaikan tahunan sebesar 3 persen selama kontrak ini. Dalam iklim ekonomi ini, dan mengingat keuntungan yang sangat luar biasa yang dihasilkan *Times* sebagai perusahaan yang sukses, hanya kenaikan tahunan 3 persen tidak cukup untuk anggota kami," kata Goldstein. Goldstein juga mengungkapkan kekecewaannya dengan batas gaji saat ini yakni sebesar 45.000 dolar AS per tahun. Di sisi lain, serikat pekerja meminta setidaknya 65.000 dolar AS per tahun. "Kami memiliki anggota yang memilikinya meminta kenaikan sewa sebesar 1.000 dolar AS selama setahun terakhir," imbuhnya. *NewsGuild* mengatakan bahwa karyawan *New York Times* yang melakukan aksi pemogokan tidak akan mendapat bayaran. Karyawan juga diminta untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum pemogokan. ● ans

ILO Serukan Pembebasan Pemimpin Buruh Myanmar

SINGAPURA(IM)-Direktur Jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Gilbert Houngbo menyerukan pembebasan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Industri Kerajinan dan Jasa Myanmar (MICS-TUFs) Thet Hnin Aung. Dia mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa Thet Hnin Aung telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan kerja paksa dan denda, meskipun berulang kali diminta agar dibebaskan oleh Badan Pimpinan ILO. "Saya mendesak pihak berwenang untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Thet Hnin Aung. Hak organisasi pekerja dan organisasi pengusaha hanya dapat dilaksanakan dalam iklim yang bebas dari kekerasan, tekanan, atau ancaman dalam bentuk apapun terhadap pimpinan dan anggota organisasi tersebut," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12). Lebih lanjut dia menegaskan bahwa penindasan tanpa

henti terhadap perbedaan pendapat, serta kekerasan yang dilakukan terhadap rakyat Myanmar, dan pengabaian hak asasi manusia harus diakhiri. Pada Juni 2021, Konferensi Perburuhan Internasional meminta Myanmar memulihkan tatanan demokrasi dan pemerintahan sipil, menghentikan semua serangan, serta ancaman dan intimidasi oleh militer terhadap pekerja, pengusaha dan organisasinya masing-masing, serta masyarakat umum. Konferensi juga mendesak untuk pembebasan para pemimpin buruh dari tahanan dan pencabutan tuduhan terhadap semua orang yang telah melakukan unjuk rasa secara damai. Lebih lanjut, Gilbert juga menyoroti kewajiban Myanmar yang sebagai anggota ILO dan ratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi tahun 1948 (Nomor 87). ● gul

Tentara Thailand Tewaskan 15 Penyelundup Narkoba

BANGKOK(IM)-Tentara Thailand bentrok dengan tersangka penyelundup narkoba di kawasan hutan di utara negara itu dekat perbatasan Myanmar, Kamis (8/12). Seperti dilaporkan AP, baku tembak ini menewaskan 15 orang. Para prajurit menghadapi kelompok tersangka yang membawa ransel pada Rabu (7/12) malam dan memerintahkan mereka untuk berhenti, tetapi mereka malah melepaskan tembakan, menurut Satuan Tugas Pha Muang, unit militer yang bertanggung jawab atas keamanan di provinsi perbatasan utara Thailand. Baku tembak terjadi sekitar 10 menit, tidak ada tentara yang terluka. Tetapi pada Kamis pagi, ketika militer kembali untuk memeriksa tempat kejadian di distrik Fang di provinsi Chiang Mai, mereka menemukan 15 tersangka penyelundup tewas dan 29 ransel berisi sabu. Masih diselidiki apakah

tersangka membawa sabu dari Myanmar. Rute tersebut merupakan rute umum untuk narkoba yang diselundupkan ke Thailand. Jumlah pasti sabu yang disita juga tidak segera tersedia, dan satuan tugas tidak mengatakan apakah ada tersangka yang diyakini telah melarikan diri. Namun, 30 kantong narkoba dilaporkan ditemukan di lokasi. "Kami melakukan pemeriksaan awal dan menemukan bahwa itu adalah ice," kata seorang pejabat militer setempat, setelah menggeledah tas-tas tersebut, seperti dikutip dari *trt World*. Ice adalah nama jalan untuk metamfetamin, stimulan yang sangat adiktif yang sering diproduksi di Myanmar dan dikirim melalui Thailand dan Laos untuk dieksport ke seluruh Asia. Pihak berwenang di seluruh Asia Tenggara telah membuat rekor penyitaan meth dalam beberapa tahun terakhir. ● ans

Anak-anak Albania Hadapi Intimidasi Rasis di Sekolah Inggris

LONDON(IM)-Anak-anak Albania di Inggris menjadi sasaran "intimidasi rasis" di sekolah-sekolah lokal. Perundungan ini terjadi karena perdebatan tentang kedatangan migran Albania dengan perahu kecil. Berbicara di tengah meningkatnya retorika anti-Albania oleh media dan politisi, Duta Besar Albania untuk Inggris, Qirjako Qirko menyerukan diakhirinya kampanye diskriminasi tersebut. Di hadapan Komite Urusan Dalam Negeri Parlemen Inggris pada Kamis (8/12), Qirko memperingatkan anggota parlemen agar tidak memperkuat stereotip negatif tentang orang-orang dari Albania. "Kegiatan semacam ini harus segera dihentikan karena

na ada orang, terutama anak muda yang di-bully di sekolahnya hanya karena mereka orang Albania," ujar Qirko, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (9/12). Seperti dari 33.000 migran Channel yang tiba di Inggris dalam sembilan bulan pertama tahun 2022 merupakan warga Albania. Qirko mengatakan, di antara lebih dari 100.000 orang Albania yang tinggal di Inggris Raya berprofesi sebagai dokter, pengacara, dan insinyur. Qirko menyatakan, memperkuat stereotip negatif dalam waktu lama akan mendorong diskriminasi dan rasisme. Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menggunakan istilah "penjahat Albania" di Parlemen. ● tom

Taliban Kembali Cambuk 27 Warga Afghanistan Dihadapan Publik

KABUL(IM) - Taliban yang kini menguasai Afghanistan menghukum cambuk 27 orang, termasuk diantaranya sejumlah wanita di hadapan kerumunan banyak orang. Pencambukan ini terjadi sehari setelah Taliban mengeksekusi mati seorang terpidana pembunuhan untuk pertama kalinya sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan tahun lalu. Seperti dilansir AFP, Jumat (9/12), meskipun menjajkan pemerintahan lebih lembut dibandingkan beberapa dekade lalu, Taliban secara bertahap membatalkan kembali interpretasi hukum Islam yang ekstrem versi mereka di Afghanistan. Dalam sebuah pertanyaan, Mahkamah Agung menyatakan 27 orang yang disebut sebagai 'penjahat' telah dihukum cambuk pada Kamis (8/12) waktu setempat, di Chankar, ibu kota Provinsi Parwan, yang berjarak sekitar 50 kilometer sebelah utara Kabul. Disebutkan bahwa sekitar sembilan wanita termasuk dalam kelompok yang dihukum atas berbagai kejahatan, termasuk 'sodomi, penipuan, saksi palsu, pemalsuan, penjualan dan pembelian tablet K (jenis narkoba), kekejaman, kabur dari rumah, perampokan jalan raya dan hubungan ilegal'. "Masing-masing penjahat mengakui kejahatan mereka di hadapan pengadilan tanpa paksaan

dan merasa puas dengan hukumannya," sebut Mahkamah Agung Afghanistan dalam pernyataannya. Seorang saksi mata menuturkan kepada AFP bahwa ada lebih dari 1.000 orang yang menonton eksekusi hukuman cambuk itu, yang dilakukan di sebuah stadion di kota tersebut. "Masyarakat menjeritkan 'Allahu akbar' dan 'kami ingin hukum Tuhan diterapkan di tanah kami,'" tutur saksi mata itu. Saksi mata itu juga menambahkan bahwa kerumunan orang mengejek orang-orang yang dihukum cambuk dengan teriakan "akankah kalian melakukannya lagi". Orang-orang yang dihukum cambuk mengerang kesakitan saat menerima sekitar 20-30 cambukan menggunakan tongkat sepanjang 1 meter dan selebar empat jari. Eksekusi hukuman cambuk itu dilakukan sebuah tim Taliban yang bergiliran melakukan cambukan. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menolak kritikan internasional yang muncul terhadap hukuman publik semacam itu. Dia menyebut kritikan-kritikan internasional itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Islam. Mujahid menilai kritikan-kritikan menunjukkan orang luar "tidak menghormati keyakinan, hukum dan masalah internal umat Muslim". ● gul



INFLASI DI TURKI MELONJAK

Seorang pria berbelanja di pasar barang bekas di Ankara, Turki, pada 6 Desember 2022. Jual-beli barang bekas menjadi populer di Turki karena konsumen mencari produk bekas yang terjangkau di tengah penderitaan ekonomi dan melonjaknya inflasi di negara itu.